

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



LAPORAN HASIL EVALUASI

**Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2021 pada Dinas Pengendalian penduduk
dan keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.**

Nomor : PW.02.02/ 402/ Inspt-Irban II/ 2022

Tanggal : 18 Maret 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Nomor : *Pa 02.02/1402/InsSP - Irbon II / 2022*

16 Maret 2022

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Bereencana Kabupaten Purwakarta.

Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bereencana
Kabupaten Purwakarta.

Di

Purwakarta

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 700/141/InsSP/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bereencana Kabupaten Purwakarta.

Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melakukan evaluasi yang hasilnya tertuang dalam laporan terlampir.

Demikian, agar dapat menjadi bahan peningkatan manajemen kinerja.



NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email : inspektorat@purwarkartakab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
TAHUN 2021 PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : PW.02.02/48/Inspt-Irtan II/2022
Tanggal : 18 Maret 2022

Ikhtisar Eksekutif

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 telah di Implementasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dengan hasil Evaluasi yaitu sebesar 81,05 (Delapan Puluh Satu Koma Nol Lima) rincian nilai pada komponen Perencanaan Kinerja, yaitu 25,50 (Dua Puluh Lima Koma Lima Nol), Pengukuran Kinerja sebesar 24,00 (Dua Puluh Empat Koma Nol Nol), Pelaporan Kinerja sebesar 12,30 (Dua Belas Koma Tiga Nol), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 19,25 (Semblan Belas Koma Dua Lima). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 adalah **Memuaskan** Rekomendasi diberikan sebagai bahan perbaikan Implementasi SAKIP ahun berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi Sakip adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Perintah Tugas Nomor: 700/141/Insp/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2021 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

b. Latar Belakang

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, Alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, Pengklasifikasian, Pengkategorian, dan Pelaporan Kinerja pada Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian Kinerja yang tepat Sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Instansi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan Implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian Kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi:

1. Memperoleh Informasi tentang Implementasi SAKIP ;
2. Menilai tingkat Implementasi SAKIP ;
3. Menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindakan rekomendasi hasil Evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualifikasi Perencanaan Kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyediaan strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnanya yang memberikan dampak besar dalam penyediaan strategi/kebijakan dalam mencapai Kinerja berikutnya;
4. Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan Implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi Kinerja.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemampuan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Adapun Teknik Evaluasi AKIP yang digunakan adalah Checklist Pengumpulan Data dan Informasi, Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana serta Studi Dokumentasi

f. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dimana secara implementatif diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 110 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

a. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta telah dilakukan dengan melakukan kegiatan mulai dari Penyusunan Dokumen Perencanaan strategis lima tahunan (Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023) yang dijabarkan dengan perencanaan kinerja tahunan, dimana pada tahun 2021 telah disusun Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021. Indikator keberhasilan kinerja beserta targetnya telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya untuk indikator tahunan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) atau Tapkin untuk indikator tahunan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Individu (IKI) 2021 antara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta. Cascading perjanjian kinerja telah dibuat sampai dengan eselon 4 dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk melaksanakan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya sebagai langkah tupoksi struktural untuk pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya sebagai langkah aksi pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Kinerja. Pada awal tahun 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2021 yang disertai Pengukuran Kinerja sebagai dokumen pertanggungjawaban.

b. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut atas saran evaluasi SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta tahun sebelumnya telah dilakukan perbaikan hal ini terlihat dari meningkatnya nilai SAKIP tahun 2021.

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi Gambaran Evaluasi SAKIP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dalam mencapai keberhasilan indikator kinerja telah membuat Inovasi adapun inovasi adalah sebagai berikut :

- a) Inovasi pelayanan KB bergerak ke pelosok-pelosok Desa/ Kelurahan untuk mempermudah Akses Pelayanan KB tujuan nya adalah untuk meningkatkan cakupan pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif.
- b) Inovasi melakukan kerjasama Praktek Bidan Mandiri (PMB) untuk pelayanan KB tujuannya untuk mendekatkan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan KB.
- c) Inovasi sosialisasi di media sosial terhadap penggunaan alat kontrasepsi mantap tujuannya untuk meningkatnya cakupan pengguna alat kontrasepsi mantap.
- d) Inovasi melakukan pelayanan KB MKJP secara serentak di kegiatan Gempungan dan momentum tujuan nya untuk meningkatkan keikutsertaan ber KB menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang.
- e) Inovasi melakukan pembinaan terhadap peserta KB Aktif tujuannya untuk mengurangi angka Drop out peserta KB.
- f) Inovasi Bekerjasama dengan Bidang- bidang terkait untuk mempercepat proses pelaporan di Aplikasi NEWSIGA tujuannya untuk pelaporan yang cepat di harapkan droping alkon ke setiap klinik dapat dilaksanakan di awal Bulan .
- g) Memberikan pelatihan penyuluhan program Bangsa Kencana dan teknik KIE kepada kader IMP di setiap UPTD KB tujuannya untuk meningkatkan pemahaman kader IMP terhadap Program Bangsa Kencana dan Teknik KIE kepada masyarakat
- h) Penggunaan Aplikasi AMBU KEREN untuk merekap seluruh kegiatan di lapangan tujuan nya untuk mempermudah proses Evaluasi program di setiap Kecamatan.

- i) Menambah petugas lapangan PLKB non PNS untuk mempercepat penyampaian program bangsa kencana , tujuannya untuk kesesuaian arahan kebijakan pemerintah Daerah I petugas I Desa/kelurahan .
 - j) Aplikasi pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) tujuannya untuk mendaftarkan kepada keluarga kaitan dengan Program Bangsa Kencana.
- Selain ada beberapa inovasi yang telah diimplementasikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2021 mendapatkan:
- a) Penghargaan apresiasi ke-3 terbaik dari Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa barat atas pengelolaan pendataan keluarga tahun 2021 untuk kategori KK kurang dari 500.000 KK.
 - b) Penghargaan terbaik 5 dari Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa barat atas capaian peserta KB baru MKJP lebih dari 100% Tahun 2021 ,
 - c) Penghargaan terbaik 4 dari Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa barat atas capaian peserta KB baru MOP lebih dari 100% Tahun 2021.
 - d) Penghargaan terbaik 1 dari Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa barat atas capaian peserta KB baru lebih dari 100% tahun 2021.
- Sehingga hasil penilaian SAKIP Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Sebagai berikut:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 25,50 (Dua Puluh lima koma lima nol) (85 % dari bobot 30), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

1. a Dokumen Perencanaan Kinerja Telah tersedia

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia dengan 6 (enam) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4.8 (Empat koma Delapan) (Kriteria terpenuhi 100 %) dengan gradasi nilai BB, Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia:

- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023 yang mengacu ke RPJMD 2018-2023 dan Perubahan RPJMD 2018-2021 dan RPJPD 2005-2025.

- Renja TA.2021 dan Renja Perubahan 2021 yang mengacu ke RKPD 2021 dan RKPD Perubahan 2021
- SOP Renstra Tahun 2020
- SOP Renja Tahun 2020
- SOP RKA 2021
- SOP/Pedoman Perencanaan kinerja
- Perencanaan aktivitas yang mendukung Kinerja (Rencana Aksi Kinerja)

1.b Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

Evaluasi atas Sub Komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) dengan 11 (sebelas) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 7,2 (Tujuh Koma Dua) kriteria terpenuhi 100 % dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dapat di lihat dari dokumen.

- Renstra dan Renja telah diformalkan dengan Keputusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta;
- Renstra dan Renja telah dipublikasikan di Website Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- SKP 2021
- Renstra dan Renja telah memuat Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) yang menggambarkan kondisi Kinerja yang akan dicapai.
- Crosscutting program Kegiatan Tahun anggaran 2021
- IKU telah SMART dan telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).

- Terdapat Perjanjian Kinerja, Cascading Kinerja, Indikator Kinerja Individu yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
- Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai.
- Perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
- Bukti screenshot publikasi perencanaan.

1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

Evaluasi atas Sub Komponen Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan 8 (Delapan) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 13,50 (Tiga belas koma lima nol) kriteria terpenuhi 100% dengan gradasi nilai A. yang telah terpenuhi yaitu:

- Laporan realisasi capaian sub kegiatan ,kegiatan program per triwulan TA 2021
- Laporan Evaluasi dan Monitoring Program kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2021
- Laporan Realisasi Anggaran 2021.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 24,00 (Dua puluh empat koma nol nol) (80 % dari bobot 30), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

2.a Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan

Evaluasi atas Sub Komponen Pengukuran Kinerja Telah dilakukan dengan 3 (Tiga) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 5,4 (Lima koma empat) kriteria terpenuhi 100% dengan gradasi nilai A, hal tersebut dikarenakan dalam pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja telah dibuatkan SOP yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Nomor:

900/10/I/DPKIB/2021 tanggal 4 Januari 2021 serta adanya Matrik inovasi yang mendukung pencapaian indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

2. b Pengukuran kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Evaluasi atas Sub Komponen Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan 7 (tujuh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 8,1 (Delapan koma satu) kriteria terpenuhi 100% dengan gradasi nilai A, yaitu

- Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam pengukuran kinerja;
- Data kinerja yang telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan serta telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan dibuatkan laporan capaian sub kegiatan dan program per triwulan dan laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan
- Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi yang ada di Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta yaitu SIP.
- Laporan realisasi capaian Sub Kegiatan, kegiatan, program, petriwulan 2021
- Laporan Realisasi Fisik dan keuangan bulan Desember 2021
- Pengukuran kinerja Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021.
- Matrik inovasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan di tanda tangani oleh Kepala dinas.
- Notulen Rapat Evaluasi Kinerja di tandatangani langsung Kepala Dinas.

2. c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Evaluasi atas Sub Komponen Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan 10 (sepuluh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 10,5 (Sepuluh koma lima) kriteria terpenuhi 80% dengan gradasi nilai B. Dalam pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 275 Tahun 2020 tentang Tatacara Pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Laporan Kinerja Pegawai bulanan dan Indikator Kinerja Individu, akan tetapi pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam hal penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional serta penyesuaian (Refocusing) Organisasi.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 12,30 (Dua Belas koma Tiga Nol) (82% dari bobot 15), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

3. a Terdapat Dokumen Laporan yang Menggambarkan Kinerja

Evaluasi atas Sub Komponen Terdapat Dokumen Laporan yang Menggambarkan Kinerja dengan 6 (Enam) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 2,4 (Dua koma empat) dengan gradasi nilai BB. Dokumen laporan yang menggambarkan kinerja telah disusun yaitu tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Nomor : SK / 476 / Kep. DPPKB / 2021 Dan telah ada bukti bahwa laporan kinerja tersebut telah direvisi dan dipublikasikan.

3. b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnanya

Evaluasi atas sub komponen dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnanya dengan 9 (sembilan) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 3,15

(Tiga koma satu lima) kriteria terpenuhi 88,89% dengan gradasi nilai BB. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang tertuang dalam BAB III dan BAB IV LAKIP 2021, akan tetapi dalam LAKIP 2021 belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja).

3.c Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Evaluasi atas sub komponen pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan 7 (tujuh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 6,75 (Enam koma tujuh lima) kriteria terpenuhi 100% dengan gradasi nilai A.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 19,25 (77 % dari bobot 25) yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

4.a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Evaluasi atas sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan 3 (Tiga) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4,00 (Empat koma Nol Nol) kriteria terpenuhi 100% sesuai dengan mandat kebijakan dengan gradasi nilai BB. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan kepada seluruh OPD sesuai dengan SOP Akuntabilitas Kinerja Internal dan Surat Perintah Kerja Inspektur perihal evaluasi SAKIP OPD.

4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.

Evaluasi atas sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai dengan 5 (lima) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 5,25 (Lima koma Dua Lima) kriteria terpenuhi 80% dengan gradasi nilai B.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas sesuai dengan SOP Akuntabilitas Kinerja Internal dan Sumber Daya yang memadai yang telah mengikuti Pola Pengembangan Mandiri Evaluasi SAKIP, akan tetapi evaluasi akuntabilitas kinerja belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

4.c Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Evaluasi atas sub komponen Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja dengan 5 (lima) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 10,00 (Sepuluh koma Nol Nol) kriteria terpenuhi 100% sesuai dengan mandat kebijakan gradasi nilaiBB.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Atas kekurangan hasil Evaluasi tersebut di atas, direkomendasikan kepada Sekretaris Daerah agar selalu mengimpelentasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkesinambungan dan terus menerus.

BAB III PENUTUP

a. Simpulan

Tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 adalah **MEMUASKAN** yaitu sebagai berikut :

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	81,05
Predikat			A – Memuaskan

- b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten purwakarta beserta jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan Implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah di rencanakan serta mengoptimalkan pemanfaatan Inovasi yang di kembangkan terkait perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja.


DASPEKTUR
Ir. H. Nurhidayat, M.M. CGCAE

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19640515 199203 1 008